

PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)
TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
(STUDI PEMIKIRAN EMANSIPASI MENURUT FIQH SIYASAH IMAMAH)

SKRIPSI

Oleh

Sukardi

NIM. C95214055



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sukardi
NIM : C95214055
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gu Dur) Terhadap
Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi
Menurut Fiqh Siyasah Imamah)

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,




Sukardi
NIM. C95214055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sukardi NIM. C95214055 ini telah diperiksa dan
disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 03 Oktober 2018.

Pembimbing



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag

NIP 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sukardi NIM. C95214055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
NIP. 196701021992031001

Penguji II



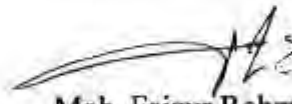
Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Mahir, M.Fil.L.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 201603310

Surabaya, 06 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19591218 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUKARDI
NIM : C95214055
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Sukardiaza10@gmail.com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :


☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : **PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (STUDI PEMIKIRAN EMANSIPASI MENURUT *FIQH SIYASAH IMAMAH*)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 November 2018

Penulis

SUKARDI

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah Imamah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, Bagaimana Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Terhadap Kepemimpinan Perempuan? Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Imamah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Tentang Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid tidak menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin negara. Sebab, dalam kenyataan, banyak pemimpin negara yang sukses justru dari kalangan perempuan. Misalnya Cleopatra, Ratu Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher, Benazir Bhuto, dan lebih jauh lagi Ratu Balqis yang bisa membawa negaranya pada kemakmuran yang hampir menandingi kerajaan Sulaiman as, adalah para pemimpin hebat. Banyak juga perempuan lain yang berhasil membuktikan bahwa justru kemampuan perempuanlah yang lebih superior dan jauh di atas laki-laki, dan ribuan anak-anak perempuan ulama muslimin justru menjadi sarjana S1 hingga S3, karena persamaan hak antara pria dan wanita dijamin oleh UUD, termasuk dalam pendidikan. Sebab sukses tidaknya perempuan menjadi pemimpin sangat bergantung kepada penerimaan laki-laki yang berada dibawah ke pemimpinannya, apakah mereka bersedia untuk bekerja sama dibawah komando perempuan atau kah tidak. Sedangkan dalam *Fiqh Siyasah Imamah* kepemimpinan Perempuan, tak ada satupun Nash al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan karena, tidak bertentangan dengan syari'ah. Baik sebagai kepala negara (*al-wilāyah al-udzmah*) maupun posisi jabatan di bawahnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas untuk para masyarakat diharapkan khususnya kepada suatu instansi atau lembaga dan msyarakat pada umumnya, selama pemimipin yang memimpin adalah mengajak kepada kebenaran dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ikuti dan patuhilah. Baik itu pemimpin berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Kajian Pustaka.....	19
E. Tujuan Penelitian.....	19
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	20
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	26

PENDAHULUAN

t terbaik bagi perencanaan rumah tidak diperb

s kehidupan kaum perempuan terlihat masih banyak. Mereka dalam masyarakatnya sering dipandang sebagai *second class*), sering kali hak-hak mereka hanya sekedar sebagai penonton. Kehidupan yang sangat eksklusif dan marjinal.

⁵ Pengantar Husein Muhammad dalam Amirudin Arani (ed.), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), xi.

Riffat Hassan sebagaimana dikutip oleh Syafiq Hasyim, mensinyalir adanya faktor yang menyebabkan terjadinya subordinasi⁷ dan segregasi⁸ terhadap perempuan. Dia menyatakan bahwa ada tiga asumsi teologis yang dikenal dalam Yahudi, Kristen, dan Islam yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan. Pertama, makhluk utama Tuhan adalah laki-laki, bukan perempuan, karena perempuan diyakini tercipta dari tulang rusuk adam, sehingga secara ontologis perempuan adalah makhluk derivatif dan nomor dua. Kedua, perempuan adalah penyebab kejatuhan laki-laki dari surga. Ketiga, perempuan tidak hanya diciptakan dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki.⁹

⁶ Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), 23-24.
⁷ Diartikan dengan kedudukan bawahan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1379.
⁸ Diartikan dengan pemisahan (suatu golongan dari golongan lain), pengasingan, dan pengucilan.
⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 48.
¹⁰ Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet I (Jakarta: Logos, 1999), 71.

¹⁰ Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet I (Jakarta: Logos, 1999), 71.

Sektor publik adalah, tempat dimana seseorang mengaktualisasikan diri sebagai makhluk yang berbudi, yang dalam bahasa agama disebut khalifah Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta (*rahmatan lil-‘alamin*). Satu hal yang paling penting untuk menuju kesana adalah, adanya kesadaran untuk menegakkan kebenaran, mendorong terwujudnya hal-hal yang baik, dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak benar (*al-‘amru bil-ma’ruf wannahyu ‘anil-mun’kar*). Tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh satu jenis manusia, sementara satu jenis yang lain melakukan hal yang sebaliknya. Sebagai manusia yang sama-sama mengemban tugas kekhalifahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerjasama, bahu-membahu, dan saling mendukung dalam melakukan *al-‘amru bil-ma’ruf wannahyu ‘anil-mun’kar*, demi menciptakan tatanan dunia yang benar, baik, dan indah dalam ridha Allah, seperti yang tertuang dalam surat at-Taubah ayat 71:

[illegible]

170

cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Mahabijaksana.¹⁴

Yang telah disebutkan di atas tersebut, menunjukkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada semua hal sosial maupun politik. Sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membereskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan tersebut dalam konsep perkawinan. Dimana perkawinan adalah akad kontrak antara dua orang yang sepakat untuk menjalani kehidupan. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi dasar bagi perempuan untuk menjadi patner laki-laki dalam kehidupan.

cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Mahabijaksana.¹⁴

Yang telah disebutkan di atas tersebut, menunjukkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada semua hal sosial maupun politik. Sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membereskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan tersebut dalam konsep perkawinan. Dimana perkawinan adalah akad kontrak antara dua orang yang sepakat untuk menjalani kehidupan. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi landasan bagi perempuan untuk menjadi patner laki-laki dalam kehidupan.

cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Mahabijaksana.¹⁴

Yang telah disebutkan di atas tersebut, menunjukkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada semua hal sosial maupun politik. Sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membereskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan dalam konsep perkawinan. Dimana perkawinan adalah akad kontrak antara dua orang yang sepakat untuk menjalani kehidupan. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi landasan bagi perempuan untuk menjadi patner laki-laki dalam kehidupan.

cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Mahabijaksana.¹⁴

Yang telah disebutkan di atas tersebut, menunjukkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada semua hal sosial maupun politik. Sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membereskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan tersebut dalam konsep perkawinan. Dimana perkawinan adalah akad kontrak antara dua orang yang sepakat untuk menjalani kehidupan. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi dasar bagi perempuan untuk menjadi patner laki-laki dalam kehidupan.

cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Mahabijaksana.¹⁴

Yang telah disebutkan di atas tersebut, menunjukkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada semua hal sosial maupun politik. Sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membereskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan tersebut dalam konsep perkawinan. Dimana perkawinan adalah akad kontrak antara dua orang yang sepakat untuk menjalani kehidupan. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi landasan bagi perempuan untuk menjadi patner laki-laki dalam kehidupan.

cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Mahabijaksana.¹⁴

Yang telah disebutkan di atas tersebut, menunjukkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada semua hal sosial maupun politik. Sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membereskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan tersebut dalam konsep perkawinan. Dimana perkawinan adalah akad kontrak antara dua orang yang sepakat untuk menjalani kehidupan. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi landasan bagi perempuan untuk menjadi patner laki-laki dalam kehidupan.

Sebagaimana dikemukakan Gus Dur bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai derajat yang sama, memiliki persamaan hak, kewajiban dan

¹⁸ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000*, (Jakarta: SekJen dan Kepanitraan MK, 2011), Cet-1, 29.

Pertama, hak dasar bagi keselamatan fisik wanita maupun pria itu sama, yaitu perlindungan bagi warga negara dalam pengertian hak asasi manusia. Warga negara tidak boleh disiksa atau dikenai sanksi fisik apapun, kecuali memang terjadi kesalahan menurut prosedur hukum yang benar.

Ketiga, hak dasar mengenai keturunan dan keselamatan keluarga. Wanita juga ikut di dalam hak itu, pria maupun wanita sama-sama mempunyai hak dasar yang sama akan keselamatan pribadi (*milk al-fardi*), setiap orang memiliki harta pribadi yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diutak-atik oleh siapa pun.

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *“Islam dan Hak Asasi Manusia”*, dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat* (Bandung: Mizan, 1999), 35-36.

Kelima hak ini merupakan hak dasar yang dimiliki perempuan dan laki-laki secara bersama-sama, wanita dan pria memiliki derajat dan status yang sama dengan pria. Wanita dan pria memiliki persamaan hak, kewajiban, dan kesamaan kedudukan.

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun pada level yang lebih rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era reformasi. Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya KH. Abdurrahman Wahid “Gus Dur” dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarno putri menjadi

[illegible]

reformasi Megawati Sukarno Putri yang r
a banyak menteri, anggota DPR RI, DPRD, gu
akim wanita yang telah mampu memimpin denga
ara Muslim lain, fenomena kepala negara wan
Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM
a negara Pakistan dua periode yang pertama pada
pada tahun 1993-1996.²³ Begitu kompleks perm
juga menarik perhatian kalangan ulama Islam di
an permasalahan dan mencari solusinya dari sudu
. Husein Muhammad dikenal sebagai Kiai Femi
tentang perempuan yang mengaku tertarik unt
permasalahan perempuan dalam Islam setelah m

reformasi Megawati Sukarno Putri yang r
a banyak menteri, anggota DPR RI, DPRD, gu
akim wanita yang telah mampu memimpin denga
ara Muslim lain, fenomena kepala negara wan
Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM
a negara Pakistan dua periode yang pertama pada
a pada tahun 1993-1996.²³ Begitu kompleks perm
juga menarik perhatian kalangan ulama Islam di
an permasalahan dan mencari solusinya dari sudu
. Husein Muhammad dikenal sebagai Kiai Femi
tentang perempuan yang mengaku tertarik unt
permasalahan perempuan dalam Islam setelah m

²² Dari 123 calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan yang mengikuti Pilkada 2015, setidaknya ada 35 calon perempuan yang terpilih,” dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 <http://www.rappler.com/indonesia/115543-perempuan-menang-di-pilkada-2015>.

²³ Libby Hughes, *Benazir Bhutto, from Prison to Prime Minister*, (Universe: 2000), 45.

²³ Libby Hughes, *Benazir Bhutto, from Prison to Prime Minister*, (Universe: 2000), 45.

dalam pendidikan di kalangan pesantren, dan beliau menemui cukup banyak bias gender yang ada dalam teks-teks tersebut.

Dengan ungkapan lain, ketika perempuan berperan sebagai warga negara, setiap perempuan berhak mengekspresikan pendapat dan pandangannya dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, berhak mengungkapkan pendapat dalam setiap pemilihan, baik di tingkat Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan seterusnya, serta menyatakan aspirasinya dalam satu referendum, setiap perempuan berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, baik ditingkat DPR maupun DPRD. Bahkan, setiap perempuan berhak mencalonkan diri dalam semua jabatan penting di dalam Negara maupun pemerintahan, termasuk berhak menjadi presiden. Ungkapan Musdahmulia didasarkan atas perkembangan pandangan politik di Indonesia. Di mana sosok perempuan berhasil menjadi pemimpin politik bahkan sampai pada pucuk pimpinan tertinggi yaitu Presiden sebagaimana yang dijabat oleh Megawati Sukarno Putri. Bahkan dalam pemilihan langsung tahun 2015, setidaknya 35 perempuan memenangkan pertarungan dalam hitung cepat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak Rabu, 9 Desember 4 tahun yang lalu. Tren ini menunjukkan bahwa perempuan dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki.

Di dalam pandangan Islam, kepemimpinan perempuan menjadi sebuah perdebatan yang sangat kuat antara memperbolehkan dan tidak memperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Pada kenyataannya sebagian masyarakat berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi

²⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, 85.

Meskipun demikian,²⁶ Sejalan dengan pemikiran Gus Dur, bahwa semua produk hukum, baik itu yang bersumber al-Qur'an maupun al-Hadist, harus dicari informasi sebanyak-banyaknya tentang akar kesejarahannya, para ulama dan kiai juga harus memiliki kejelian yang sama. Apabila tidak, para ulama dan kiai sebagai salah satu “sumber hukum” di masyarakat bisa terombang-ambing. Lebih jauh, bahkan, mengombang-ambingkan diri (mempermainkan hukum untuk memihak pada pihak yang menguntungkan) dalam permasalahan yang berkembang di dalam kehidupan umat yang terus bergerak.²⁷

²⁶ M. N Ibad, *Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 88.

²⁷ *Ibid*, 94.

Pada dasarnya perbedaan laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Sementara itu gender merupakan konstruksi sosio-kultural. Pada prinsipnya gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis seperti selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat.²⁹

²⁸ Ani Wadyai Soetjipto, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Kompas, Jakarta, 2.
²⁹ Fauzi Ridjal (ed), *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, 30.
³⁰ Musdah Mulia, *Prinsip Kesetaraan Gender*, <http://docplayer.info/146875-Prinsipkesetaraan-manusia-musdah-mulia.html>, diakses pada: 29 Juli 2018.

اَللّٰهُ اَتَقَنَكُمۡ اِنَّ اِلٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa Islam itu menghargai harkat, martabat, derajat, hak setiap perempuan, tanpa membedakan dengan laki-laki. Perempuan bebas untuk mengembangkan ekonominya dan tidak lagi termarginalkan.³² Karena Islam memiliki prinsip yang universal, serta memuat kaidah-kaidah hukum yang fundamental, maka diperlukan upaya kajian lebih lanjut dengan teliti terhadap al-Qur'an sehingga Islam mampu beradaptasi dalam merespon tantangan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu dari berbagai tempat hingga akhir zaman (*salih likulli zaman wa makan*).³³

³¹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, 518.
³² Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*,. 148.
³³ Dedi Supriadi, *Sejarah dan Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),.62.

³³ Dedi Supriadi, *Sejarah dan Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 62.

B. Identifikasi Maslah dan Batasan Masalah

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Imamah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Tentang Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid

ana Analisis Fiqh Siyasah Imamah Terhadap Pemikiran KH. Abdurrahman Wajid

ka

t akan diuraikan secara ringkas tentang ka

ilakukan di seputar masalah Pemikiran KH.

hadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Po

1. Skripsi dengan judul **“Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia)”** yang ditulis oleh Samsul Zakaria Jurusan Hukum Islam (Syari’ah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013.

2. Skripsi dengan judul **“Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Islam”**. Yang ditulis oleh So'idah Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakh siyah. Tahun 2002.

3. Kemudian Tesis Ahmad Zuhri Rangkuti dengan judul “Studi Analisis Konsep Muhammad Abduh (1266-1323 H/1 849-1905) Tentang Al-Qawwamah dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam”.

³⁵ So'adah. Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Islam. Skripsi fak. Syari'ah thn. 2002.

Tesis ini menjelaskan bahwa pemikiran Muhammad Abduh di bidang fiqih, menurutnya hukum-hukum kemasyarakatan perlu disesuaikan dengan zaman baik itu soal ibadah, ijtihad, maupun *al-qawwamah* (kepemimpinan), dalam konsep *al-qawwamah* menurut Muhammad abduh ini, mempunyai pengaruh atau implikasi terhadap kedudukan perempuan dalam hukum Islam, dalam permasalahan rumah tangga, kedudukan laki-laki dan perempuan, kebebasan perempuan dalam memilih calon suami, talak, dan poligami.³⁶

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran KH. Abdurrahman Wahid terhadap kepemimpinan perempuan.

[illegible]

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah imamah terhadap kepemimpinan perempuan tentang pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

Dengan tujuan ini yang hendak dicapai dalam penulisan ini, di harapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

- ## 2. Manfaat Praktis

- ### a. Objek Peneliti

- ### b. Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

Dengan adanya penelitian tentang Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap kepemimpinan perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Perempuan Menurut Fiqh Siyasah Imamah) peneliti berharap para Pemimpin perempuan dapat menjadi masukan dalam mengharmoniskan masyarakat dan mampu untuk mengambil pengetahuan beserta referensi dalam hal kepemimpinan perempuan.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *al Siyasaḥ Syar'iiyyah aw Nidzham al Dawlah al Islamiyyah* (Al Kaherah: Dar al Anshar, 1977), 5.

- ## 2. Fiqh Siyasah

3. Imamah (Pemimpin)

Suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan dan mengendalikan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 643.

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *al Siyasaḥ Syar'iyah aw Nidzham al Dawlah al Islamiyyah* (Al Kaherah: Dar al Anshar, 1977), 5.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sumber Data

³⁹ Abdul Aziz Dahlan (et.al)., *Ensiklopedi Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 193.

[illegible]

Bahan primer yang digunakan yaitu:

- Sedangkan sebagai buku tambahan yang dijadikan bahan sekunder yang dianggap sebagai pelengkap Data sekunder berupa buku-buku karya pemikiran orang lain yaitu:

- ⁴¹ M. N Ibad. *Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Mick* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 85.

- c. Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 (penyusun: Dr.'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh) Pustaka: Imam Asy-Syafi'i.
- d. Karya Imam Al-Mawardi *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al Diniyah*
- e. Pemikiran Fatimah Mernissi Kedudukan Wanita dalam Islam, karya Dr. Siti Zubaidah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Studi Pustaka yaitu penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah data yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian karangan-karangan ilmiah, Skripsi dan disertasi, pustaka juga berkaitan dengan kajian teoritis serta referensi lain. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis dan standar, kajian sedangkan yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah segala bahan keterangan atau informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian.

34 surah An-Nisa' terhadap pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dalam menyikapinya.

4. Teknik Analisis Data

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab II: Memuat data konsep pengertian kepemimpinan perempuan dalam persepektif Fiqh Siyasah Imamah.

Bab IV: Bab ini membahas Analisis Fiqh Siyasah Imamah Terhadap Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

al-Imamah al-Shugra. Biasanya kata-kata *imam* hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.⁴⁴

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (البقرة: ٢٥٥)

Dari sini kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.⁴⁶

⁴⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 54.

Perhatikan Rasulullah menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala negara dan *malik*.

Di Indonesia pemimpin atau kepala negaranya dipegang oleh seorang Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melakukan kewajibannya sebagai Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.⁵³

Dalam hal ini di kalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syi'ah dan Murji'ah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij,

⁵³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.

Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.⁵⁵

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan

⁵⁶ *Ibid*, 108-109.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرة : ۳۰)

Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, “dari kami amir dan dari kalian amir.”⁵⁹

⁵⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman dkk, dari *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 588.

⁵⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, 589.

Sedangkan kaum Mu'tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia

[illegible]

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh presiden yang dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu Oleh Wakil Presiden. Kemudian di dalam Pasal 8 pula menyebutkan :

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
2. Dalam hal terjadi kekosongan wakil Presiden, selambat-selambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

[illegible]

Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 di atas, dapat dilihat bahwa posisi seorang Presiden dan Wakil Presiden ini sangatlah penting, karena sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemegang kekuasaan yaitu Presiden. Bahkan di dalam Pasal 8 menggambarkan bahwa tidak boleh ada kekosongan sama sekali terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini. Jika jabatan ini kosong harus segera digantikan, dari sini dapat disimpulkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan yang penting dan wajib keadaannya.

1.Sifat-Sifat Kepemimpinan

Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat tertentu. Namun syarat-syarat serta sifat-sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin berbeda-beda tergantung jabatan yang dan fungsi yang pegangnya. Untuk menjadi pemimpin ketentaraan tidak mungkin sama dengan persyaratan menjadi

⁶⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 8.

pemimpin perusahaan. Demikian juga syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin industri tidak akan sama dengan persyaratan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Meskipun demikian, terdapat syarat-syarat dan sifat-sifat yang umum yang harus dimiliki oleh semua jenis kepemimpinan.

1. Adil
2. Suka melindungi
3. Penuh inisiatif
4. Penuh daya penarik
5. Penuh kepercayaan pada diri sendiri.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: *sidiq, amanah, tabligh* dan *fathonah*.⁶⁸

Semua ulama dan fuqaha dari generasi ke generasi sepakat bahwa untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan atau khilafah merupakan kewajiban agama yang sangat agung. Mereka menggunakan argumentasi fundamental dan esensial yang dinukilkan langsung dari nash sharih al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah-kaidah ushul fiqh.

Firman Allah SWT tersebut adalah perintah umum yang mencakup semua bentuk amanah. Agama adalah amanah dan syari'ah adalah amanah. Adapun hukum dan syari'ah adalah amanah. Dan seorang pemimpin yang melaksanakan syari'ah adalah amanah. Disinilah letak wajibnya memilih seorang

⁶⁸ Elbina Mamla Saidah, "Konsep Kepemimpinan dalam Islam", *Jurnal Al-Ishlah*, Volume 6, 2004.

Iqbal dengan mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mushab ibn Sa'ad, mengatakan "Hak atas seorang imam adalah menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah SWT dan menyampaikan amanah. Apabila seorang imam telah melaksanakan semua itu, maka wajib bagi manusia untuk mendengarkan, mentaati dan menjawab panggilannya. Perkataan yang paling mulia menurutku, adalah orang yang mengatakan al-Qur'an adalah kitab Allah dan melaksanakan amanah yang dilimpahkan melalui wewenangnya secara adil dan bijaksana".⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, 28.

[illegible]

Bila diteliti dan ditelaah secara seksama dan komprehensif terlihat bahwa kedua ayat tersebut mencakup rukun-rukun sebuah khilafah atau pemerintahan yang terdiri dari; *pertama*, para pemegang kekuasaan hukum ialah *wullatul amr* (pemerintahan yang sah) sesuai petunjuk syar'i dan menjalankan hukum-hukum syari'at. *Kedua*, *al-Ummah* (masyarakat) mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat pada *ulil amr*. *Ketiga*, peraturan, perundang-undangan dan disiplin hukum yang berlaku yaitu syari'at agama Islam.

Tak kalah jelasnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, “Barangsiapa melepaskan tangan dari mentaati (imamnya), ia akan menemui Allah pada hari kiamat tanpa punya pembela bagi dirinya. Barangsiapa mati sedangkan dirinya tidak ada bai’at (kepada imam) maka ia mati dalam keadaan Jahiliyah” (HR. Muslim).

Sekalipun demikian, tidak berarti umat Islam kurang peduli dan tidak perhatian terhadap masalah kepemimpinan. Semuanya diatur dan diukur secara adil dan bijaksana. Disepakati kalangan ulama' dan fuqaha bahwa terdapat keharusan adanya seorang imam guna menyatukan suara umat dan mengurus kepentingan keduniaan maupun keagamaannya.

Tidak dipungkiri mendalami ajaran Islam yang agung dan benar, memilih seorang pemimpin bukan tujuan final dari substansi agama, tetapi ia merupakan kelaziman zaman. Disadari bahwa kewajiban agama tidak mungkin diterapkan secara komprehensif dan simultan tanpa adanya pranata-pranata yang kongkrit.

[illegible]

Kesempurnaan tegaknya nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara hanya dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila didukung oleh pranata yang mengiringinya. Imam atau pemimpin adalah pranata yang mengiringi terwujudnya tegaknya nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits, maka adalah wajib hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memilih dan menetapkan seorang pemimpin.

Bagi seorang fuqaha sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan, bila tidak adanya seorang pemimpin maka akan berakibat timbulnya suatu fitnah. Fitnah ini harus dicegah karena berakibat pada kehancuran dan kerusakan (*fasad*). Mencegah kehancuran dan kerusakan adalah kewajiban.

⁷¹ *Ibid*, 35.

Pemahaman yang bijak dan mulia tentang pentingnya sebuah kepemimpinan juga dikemukakan oleh generasi-generasi sesudahnya, Syeikhul Islam Ibn Taymiyah yang hidup pada abad pertengahan menyatakan bahwa membentuk pemerintahan dengan jalan religuitas dan mengangkat kepemimpinan sesuai dengan syari'ah adalah *manhaj* (jalan) merintis ketentraman untuk menjaga umat dan menjaga harta benda.

Impian dan harapan besar umat terhadap pemimpin, mengantarkan penting dan berartinya peran seorang pemimpin dalam mendesain sebuah peradaban, bangsa dan negara. Sejarah membuktikan, kejayaan dan keemasan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas para pemimpinnya.

Sebaliknya sebuah bangsa yang sebelumnya besar dan beradab hancur dan tak berarti karena kerakusan, keserakahan dan buruknya sikap mental para pemimpinnya. Suatu contoh, hancurnya Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, lebih disebabkan oleh karena penerus tahta mahkota kekhalifahan berada di tangan-tangan pemimpin yang lemah dan tak bermoral, (*hubbud dunnya*) cinta dunia lebih kentara dan lebih lekat dibanding dengan (*hubbul-akhirah*) cinta akhirat.

Sebaliknya sebuah bangsa yang sebelumnya besar dan beradab hancur dan tak berarti karena kerakusan, keserakahan dan buruknya sikap mental para pemimpinnya. Suatu contoh, hancurnya Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, lebih disebabkan oleh karena penerus tahta mahkota kekhalifahan berada di tangan-tangan pemimpin yang lemah dan tak bermoral, (*hubbud dunnya*) cinta dunia lebih kentara dan lebih lekat dibanding dengan (*hubbul-akhirah*) cinta akhirat.

dalam Islam adalah sebagai berikut; *pertama*, hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik lagi bijaksana (QS. al-Nahl:125). *Kedua*, diskusi, jika ada perbedaan dan ketidaksamaan pandangan, maka seorang pemimpin menyelesaikan dengan diskusi dan bertukar pikiran (QS. al-Nahl:125).⁷²

Kelima, adl, tidak memihak pada salah satu pihak. Pemimpin yang berdiri pada semua kelompok dan golongan, (QS.al-Nisa':58&135, QS. al-Maidah:8) Dalam memimpin pegangannya hanya pada kebenaran, *sirathal mustaqīm* (jalan yang lurus). Timbangan dan ukurannya bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Kecintaannya hanya karena Allah dan kebencian pun

hanya karena Allah. Hukum menjadi kuat tidak hanya saat berhadapan dengan orang lemah, tapi juga menjadi kuat saat berhadap-hadapan dengan orang kuat.

Ketujuh, dari prinsip dasar kepemimpinan Islami adalah kebebasan berfikir, kreativitas dan berijtihad. Sungguh amat luar biasa, sepeninggal Rasulullah para sahabat dapat menunjukkan diri sebagai sosok pemimpin yang mandiri, kuat, kreatif dan fleksibel.

Kebalikannya ketegaran Khalifah Umar bin Khattab (khalifah ke-2) akhirnya menjadi sosok yang lembut, sederhana dan bersahaja. Sekalipun ia seorang khalifah dan menyandang gelar *amirul mu'minin*, tak menjadikan kehidupan diri dan keluarganya berubah drastis, bergelimang harta dan tahta

Dua sosok pemimpin penerus Rasulullah yang berbeda karakter tersebut, disaat sama-sama diberi amanah untuk memimpin umat dan mengelola roda pemerintahan yang tampak adalah sosok pemimpin yang banyak dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai Al-qur'an dan Hadits. Tidak sebagai pemimpin yang dipengaruhi dan dikuasai oleh karakter pribadi dan hawa nafsu.

Berbagai misi kenegaraan dipercayakan Rasulallah kepada para sahabatnya seperti misi ke Habasyah, Yaman, Persia dan Rumawi. Muncullah sosok-sosok sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Mu'adz bin Jabal, Salman al-Farisi dan Amr bin Ash. Dalam usia yang relatif muda, mereka sudah memimpin berbagai ekspedisi kenegaraan dan berbagai pertempuran penting.

Al-Ghazali, dalam beberapa bukunya secara ringkas juga membicarakan tentang syarat-syarat seorang pemimpin. Ia mengatakan, "Tidaklah diragukan bahwa menentukan seseorang untuk dijadikan imam sekedar menuruti selera tidaklah boleh. Dia haruslah orang yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan seluruh orang yang ada". Al-Ghazali kemudian menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut; (1) merdeka, (2) laki-laki, (3) mujtahid, (4) berwawasan luas, (5) adil, (6) baligh, dan (7) tidak boleh wanita.⁷⁵

Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam al Qur'an dan as-Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam

⁷⁵ *Ibid.*, 59

Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi *khalifah* Allah (wakil Allah) di muka bumi (QS.al Baqarah:3), yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus sebagai abdullah (hamba Allah) yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Sabda Rasulullah “*setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya (responsibilitiy-nya)*”.

Logislah bila konsep amanah kekhalifahan yang diberikan kepada manusia menuntut terjalinannya hubungan atau interaksi yang sebaik-baiknya

⁷⁷ H. Abuddin Nata. *Masail Al Fiqhiyah*, 124.

Tuntutannya, diperlukan kemampuan memimpin atau mengatur hubungan vertical manusia dengan Sang Pemberi (Allah) amanah dan interaksi horizontal dengan sesamanya. Jika kita memperhatikan teori-teori tentang fungsi dan peran seorang pemimpin yang digagas dan dilontarkan oleh pemikir-pemikir dari dunia Barat, maka kita akan hanya menemukan bahwa aspek kepemimpinan itu sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas maupun kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi secara horizontal semata.

Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan merencanakan. Menurut teori kepemimpinan horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori-

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa, kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dalam Islam,

Dalam istilah yang lain, kepemimpinan juga terkandung dalam pengertian “Imam”, yang berarti pemuka agama dan pemimpin spritual yang diteladani dan dilaksanakan fatwanya. Ada juga istilah “amir”, pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat. Dikenal pula istilah “ulil amir” (jamaknya *umara*) yang disebutkan dalam surat al-Nisa (59) yang bermakna penguasa, pemerintah, ulama, cendekiawan, pemimpin atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat. Dikenal pula istilah wali yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat (55).

⁷⁸ *Ibid*, 11

⁷⁹ Aunur Rohim Fakih, dk., 200, 4-5

dan terbukti dengan banyak perempuan yang
a menteri misalnya Perdana Menteri Pakistan,
a negara dua periode yakni mulai tahun 1988
tahun 1993-1996. Lalu di Bangladesh sud
mpuan yaitu Khaleda Zia dan Sheikh Hasina. Ba
kan diri dari Pakistan pada 1971. Khaleda Zia
yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996
ng. Di Indonesia ada nama-nama seperti
atu Atut dan lain-lain.

dan terbukti dengan banyak perempuan yang
a menteri misalnya Perdana Menteri Pakistan,
a negara dua periode yakni mulai tahun 1988
tahun 1993-1996. Lalu di Bangladesh sud
mpuan yaitu Khaleda Zia dan Sheikh Hasina. Ba
kan diri dari Pakistan pada 1971. Khaleda Zia
yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996
ng. Di Indonesia ada nama-nama seperti
atu Atut dan lain-lain.

dan terbukti dengan banyak perempuan yang
a menteri misalnya Perdana Menteri Pakistan,
a negara dua periode yakni mulai tahun 1988
tahun 1993-1996. Lalu di Bangladesh sud
mpuan yaitu Khaleda Zia dan Sheikh Hasina. Ba
kan diri dari Pakistan pada 1971. Khaleda Zia
yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996
ng. Di Indonesia ada nama-nama seperti
atu Atut dan lain-lain.

Nabi Muhammad tidak mewasiatkan untuk mendirikan negara Islam, juga tidak memberikan isyarat untuk memilih pemimpin setelahnya, apakah wanita atau pria. Tidak ditemukan juga dalam al-Qur'an sistem negara yang baku, sehingga permasalahan politik adalah kebebasan individu yang dianggap sebagai alat untuk menggapai kemaslahatan yang masif bagi umat, membebaskan siapa saja untuk terjun ke dunia politik dengan memenuhi syarat-syarat dengan berpedoman teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam al-Qur'an "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"(QS: An Nissa/4:58).

⁸³ Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, 49.

Keadaan diperparah ketika gaung emansipasi wanita dan hak asasi manusia yang selama ini aman-aman saja di pihak umat Islam, kemudian datang isu emansipasi dari barat mencuat kepermukaan. Karena Islam telah menempatkan hak-hak perempuan pada tempatnya begitu juga dengan laki-laki. Dalam sejarahnya Islam datang ditengah-tengah dekadensi moral yang tidak menganggap perempuan sebagai manusia seleyaknya. Kisah ini diceritakan dalam al-Qur'an Az Zuhurf / 43 : 17.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

[illegible]

Maksud ayat ini ialah bilamana dia diberi kabar tentang kelahiran anaknya yang perempuan, mukanya menjadi merah padam karena malu dan dia amat marah, padahal dia sendiri mengatakan bahwa Allah mempunyai anak perempuan. Maka Islam datang, kemudian menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Diakui pemarginalisasi pertama kali dirasakan oleh perempuan non muslim yakni Yahudi dan Kristen. Disadari adanya bias nilai-nilai patriarki dan bias gender, kemudian isu gender itupun muncul di dunia Islam pada periode modern mulai tahun 1800 M, yakni ketika dunia Islam telah bersentuhan dengan dunia Barat (Eropa)⁸⁶. Di Indonesia, Kontroversi pemimpin perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh sebelum pemilu 1999. Pro kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari politisi partai yang berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi, aktivis ormas Islam, bahkan kalangan santri yang secara kultural berafiliasi ke NU (Nahdlatul Ulama).

⁸⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, 491.

⁸⁶ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 148.

Bahkan KH. Abdurrahman Wahid mengakui kemampuan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi seorang presiden, di samping karena ia memiliki nasab dari Soekarno yang merupakan pemimpin negara, kesuksesannya memimpin PDIP membuktikan bahwa Megawati memiliki kecerdasan dalam memimpin. Menurut pandangan Abdurrahman Wahid, apa yang dimiliki Megawati yaitu nasab dan kecerdasan dalam memimpin adalah landasan yang bisa menjadikan seseorang sebagai pemimpin di masa depan⁸⁷

⁸⁷ M.N Ibad. *Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 101-102.

Dari pro dan kontra terkait kepemimpinan perempuan. Para ulama berselisih paham hingga terbentuk dua kelompok besar. Dimana sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak memperbolehkan.

a) Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, dalam (Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, Tafsir Ibnu Katsir, hlm. II/293-293). misalnya, menafsiri QS An-Nisa 4:34 menyatakan yang artinya: “Laki-laki adalah pemimpin wanita karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulah sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung; begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya Ibnu Abbas berkata

d) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Ulama Wahabi)

⁹¹ Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan qadhi atau hakim, terdapat perbedaan ulama fiqh apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini: (Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki).

2. Ulama Yang Membolehkan

Ibnu Rushd memerinci perbedaan pendapat Ulama-Ulama dalam kitab Bidayatul Mujtahid: “Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal”.⁹²

Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim antara lain: Abu Hanifah, Ibnu Hazm, Ibnu Jarir at-Tabari., dan Dr. Muhammad Sayid Thanthawi.

Dr. Muhammad Sayid Thantawi Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir,⁹³ menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Din wal Hayat*, Tantawi menegaskan: “Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena al-Qur’an memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba.”⁹⁴ Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya al-Qur’an akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Muhammad Sayid berkata: bahwa hadits ini khusus

⁹² Ibnu Rashd, dalam *Bidayatul Mujtahid*, IV/1768.

⁹³ Menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar dan Sycikh Al-Azhar pada 1996.

⁹⁴ Kisah Ratu Balqis atau Ratu Saba terdapat dalam QS An-Naml 27:23-44

Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita.⁹⁵

1) Yusuf Qardhawi

Sependapat dengan Muhammad Sayid. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (riyāṣah daulah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (*tamām al-ahliyah*).⁹⁶

Menurut Qardawi tidak ada satupun nash al-Qur'an dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya,

⁹⁵ *Harian Okaz Arab Saudi*, edisi 28 Muharram 1429, 39 mengutip dari majalah *Ad-Din wal Hayat* Mesir.

⁹⁶ Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, *Majmuk Fatawa Ibn Baz*, no. fatwa: 30461, I/424.

2) Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab (Mufti Mesir)

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Ali Jumah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya. Ia megutarakan syarat bagi perempuan ketika ingin bekerja di luar rumah.

⁹⁷ Qardhawi, “Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah” (Bairut asyamilah, 1977), 122.

[illegible]

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

D. Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Kepemimpinan

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada orang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih kemudian ditunjuk atau diangkat sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan setelah melalui proses panjang.

[illegible]

Masalah kepemimpinan sama tujuannya dengan sejarah manusia itu sendiri. Kepemimpinan dibutuhkan karena adanya keterbatasan dan kelebihan dari masing-masing manusia. Definisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Beberapa definisi yang dianggap cukup mewakili adalah;

1. Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan,” (Rauc & Behling, 1984, halm. 46).¹⁰⁰
2. Kepemimpinan adalah perilaku dari yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

Sejak 14 abad yang silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak kaum laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum

perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak kepada laki-laki. Dasar yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (Perdana Menteri atau Kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 71:

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". "Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar".¹⁰²

¹⁰² Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, 199.

Muhammad Asad mengartikan “*Qawwāmun*” sebagai “menjaga sepenuhnya” (*to take full care*) dan menjaga itu meliputi fisik dan non fisik.¹⁰⁸ At-Tabari mengartikannya dengan “tanggung jawab”. Hal ini berarti laki-laki bertanggung jawab mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami.¹⁰⁹ Yusuf Ali mengartikannya “pelindung kaum wanita”.¹¹⁰

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Qawwâmûn* berarti laki-laki sebagai penjaga, penanggung jawab, pemimpin, pendidik kaum perempuan.

¹¹⁰ Abdullah Yusuf Ali, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta: T.tb, 1993), 190.

Menurut Fazlur Rahman, laki-laki adalah bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang.¹¹¹

Demikianlah di antara berbagai penafsir yang tekstual dan penafsir kontemporer terhadap surat al-Nisa/4:34. Sehingga kalau dihadapkan dengan realitas yang ada, maka yang terlihat sekarang posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu.

¹¹²Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), 73.

E. Konsep dan Pengertian Emansipasi

Pengertian atau definisi emansipasi wanita itu sendiri secara harfiah adalah kesetaraan hak dan gender. Emansipasi wanita juga bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak-hak kaum pria di segala bidang kehidupan. Emansipasi wanita bertujuan memberi wanita kesempatan bekerja, belajar, dan berkarya seperti halnya para pria, seimbang dengan kemampuannya. Pengertian sama di sini lebih dipersepsikan pada kata sejajar karena tidak bisa dipungkiri wanita dan laki-laki jelas-jelas berbeda.

Perbedaan itu bisa dilihat dari kondisi fisik, sisi emosional yang menonjol, sifat-sifat bawaan. Secara fisiologis, misalnya, wanita mengalami haid hingga berkonsekuensi berbeda pada hukum-hukum yang dibebankan atasnya. Sementara dari kejiwaan, pria umumnya lebih mengedepankan akalinya sehingga lebih bijak, sementara wanita cenderung mengedepankan emosinya. Namun dengan emosi yang menonjol itu, wanita patut menjadi ibu yang mana punya ikatan yang kuat dengan anak.

Emansipasi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh seharusnya ditindaklanjuti dengan tindakan nyata jangan hanya sebatas tataran konsep. karena jika masih pada tataran konsep belaka maka tujuan yang diharapkan selama ini akan menjadi sia-sia. Bukti dari kesia-siaan itu adalah masih

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa emansipasi adalah usaha mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dari segi sosial budaya, psikologis bahkan moral etika dan seni. Inti dari wacana emansipasi itu sendiri adalah persamaan hak. Keadilan itu sebenarnya sudah ada, tapi hakikat keadilan gender yang memperkuat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu dalam pelaksanaannya sering kali mengalami distorsi.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan memperoleh hak, kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin kuat sehingga di antara mereka mencatat prestasi gemilang, baik dalam sektor domestik maupun di sektor publik.

¹¹³ <http://www.pustakasekolah.com/emansipasi-wanita-dan-maknanya.html/2012>. diakses pada: 7 November 2018, pukul 21:06.

langsung atau tidak-mempunyai andil dalam memberikan pembatasan hak dan gerak kaum perempuan.

Dengan dalih demikian, maka kecenderungan masyarakat menempatkan laki-laki di dunia publik dan perempuan di dunia domestik terjadi hampir pada setiap peradaban manusia. Mitos semacam ini telah melahirkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan antara kedua jenis kelamin. Perempuan dianggap superior dalam aktivitas rumah tangga (kegiatan domestik), sementara laki-laki dianggap paling bertanggung jawab dalam kegiatan publik.

Realitas ini semua, menurut Masdar F. Mas'udi, terjadi karena berpangkal muladari adanya pelabelan sifat-sifat tertentu (*stereotype*) pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Dalam Islam, perempuan bisa sejajar dengan laki-laki jika dilihat dari kaca mata spiritualitas ketuhanan. Pendirian ini, sekurang-kurangnya, tampak dalam Surah. Al-Hujurat Ayat (49): 13).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : ١٣)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹⁴

¹¹⁴ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, 518.

Dalam salah satu Hadits Nabi yang banyak sekali dikutip oleh literatur keislaman (pada bagian akhlaq), diriwayatkan sebagai berikut:

Jika titik tolaknya dari wacana yang demikian, maka posisi perempuan sangat strategis. Di sektor publik, perempuan juga harus diberi peran yang cukup, baik di wilayah politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

[illegible]

Artinya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah kaumnya dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.¹¹⁷

Peristiwa di atas bisa dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh seorang Bilqis sangatlah produktif. Dia telah mampu menghasilkan *output* yang sangat besar dengan memberikan salah satu kebijakan yang merupakan masukan (input) dalam memutuskan suatu problem.

Apabila peristiwa tersebut diimplementasikan dalam dunia ekonomi, maka Bilqis sangat memahami strategi menaklukkan lawan bisnis dengan baik sehingga bisa mendapatkan suatu hasil yang sangat memuaskan di antara kedua belah pihak.

1. Sekalipun ada presiden historis yang cukup kuat, tetap saja wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan

¹¹⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, 380.

hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada yang membolehkannya, di sisi lain ada kenyataan obyektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Sebagian ulama bersikeras menentanginya, bahkan kalangan ulama NU pun menjadi terpecah saat mendiskusikan tentang apakah mungkin perempuan menjadi pemimpin.¹¹⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

وَلِلرَّجَالِ عَلَىٰ نَاصِيَةٍ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

3. Hadis Nabi menyebutkan “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan”. (HR. Bukhari). Dan hadis yang menyebutkan orang perempuan kurang akalnya dan kurang agamanya. (HR. Muslim).

¹¹⁹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* 30 Juz, 85.

[illegible]

1. Pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (Al-Qur'an surat Al-Taubah/9:71). Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur'an surat al-Naml/27:23), seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.

[illegible]

G. Wanita Dalam Sekilas Perspektif Sejarah

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang Masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter kudrati), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.¹²¹

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hal hak-hak dan tugas-tugas wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan, banyak wanita muslimah yang aktif dalam pentas politik praktis dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti Syajaratuddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi peristiwa ini jarang sekali terjadi pada kurun waktu berikutnya. Bahkan jauh sebelum ini seperti dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan al-Qur’an” bahwa kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw.

Ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad saw sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Khalifah (Kepala

¹²¹ Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, 5.

Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus.¹²³ Namun demikian, berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah ternyata kedudukan dan tugas wanita dalam rumah tangga lebih dominan (menjadi skala prioritas utama) daripada tugas dan kewajiban yang bersifat umum, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Allah telah berfirman dalam Surat al-Ahzab: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

¹²³ *Ibid.*, 269-270.

Ayat ini menurut pemahaman al-Qurthubi merupakan perintah kepada isteri-isteri Nabi Muhammad untuk tetap berada di rumah, yang berarti secara umum berlaku juga untuk isteri-isteri umatnya.¹²⁵

Berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Tersebut secara tersurat (*dzāhir al-nas*) jelaslah bahwa kedudukan dan tugas utama (primer) kaum wanita sejatinya berada di dalam rumah tangga, sedangkan tugas di luar rumah tampaknya hanya sebagai tugas sekunder sepanjang tidak mengganggu tugas primer. Karena itu, Islam telah membebaskan tugas primer mencari nafkah kepada kepala rumah tangga (suami).¹²⁸ Dalam konteks ini bukan berarti wanita tidak boleh beraktivitas dan bekerja di luar rumah misalnya menjadi guru, dosen, politikus, direktis, muballighah, presiden, dan lain-lain, tetapi harus disesuaikan dengan karakter kudratinya.

¹²⁸ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, 84.

¹³⁰ Hamka, *Kedudukan Pesempuan dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979, 13.

BIOGRAFI KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)

A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Ad-Dakhil, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal “Ad-Dakhil” berarti “sang penakluk”. Sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tongkat kejayaan Islam di Spanyol.¹³¹

¹³¹ Greg Barton, Biografi *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012), 35.

[illegible]

Pada tahun 1948, ketika perjanjian perdamaian sudah ditanda tangani dari pihak Belanda, para pejuang Indonesia akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka tanpa diselimuti dengan bayang-bayang ketakutan. Begitu pula dengan ayah Gus Dur, Wahid Hasim yang merupakan tokoh agama yang ikut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Wahid Hasyim yang kala itu telah berbahagia dengan kelahiran putrinya yaitu Chodijah (Lili). Akan tetapi, karena ia terlibat dalam kegiatan pemerintahan yang baru maka ia sekeluarga harus pindah ke Jakarta. Pada bulan Desember 1949, Wahid Hayim dan Gus Dur berangkat ke Jakarta untuk menyiapkan rumah bagi anggota keluarga lainnya.

¹³³ *Ibid*, 35-46

[illegible]

Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumah. Berkat teman ayahnya juga Gus Dur menjadi tertarik dengan musik klasik Eropa khususnya karya-karya Beethoven. Bahkan sering kali Wahid Hasyim mengirim Gus Dur ke rumah Williem Iskandar Bueller sepanjang sore hari selepas sekolah untuk belajar musik klasik tersebut.¹³⁶

¹³⁵ Greg Barton, Biografi *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012), 39.

¹³⁶ *Ibid.*, 41.

hampir tidak berpengaruh terhadap dirinya karena berhati-hati dan selalu bertindak impulsif.

Belakang Pendidikan KH. Abdurrahman Wahid bertahun-tahun tinggal di Jakarta, Gus Dur sering sering menemaninya pergi kepertemuan-pertemuan. Ia masih menduduki kursi Menteri Agama saat itu. Ini semua dilakukan sang ayah karena ia ingin anaknya dan juga karena hal ini dianggap penting dalam pendidikan anak sulungnya ini. Pada hari Sabtu, Gus Dur bepergian menemani ayahnya untuk menghadiri acara di Gelora Bung Karno, yang dapat ditempuh dengan

hampir tidak berpengaruh terhadap dirinya karena berhati-hati dan selalu bertindak impulsif.

Belakang Pendidikan KH. Abdurrahman Wahid bertahun-tahun tinggal di Jakarta, Gus Dur sering sering menemaninya pergi kepertemuan-pertemuan. Ia masih menduduki kursi Menteri Agama saat itu. Ini semua dilakukan sang ayah karena ia ingin anaknya dan juga karena hal ini dianggap penting dalam pendidikan anak sulungnya ini. Pada hari Sabtu, Gus Dur bepergian menemani ayahnya untuk menghadiri acara di Gelora Bung Karno, yang dapat ditempuh dengan

hampir tidak berpengaruh terhadap dirinya karena berhati-hati dan selalu bertindak impulsif.

Belakang Pendidikan KH. Abdurrahman Wahid bertahun-tahun tinggal di Jakarta, Gus Dur sering sering menemaninya pergi kepertemuan-pertemuan. Ia masih menduduki kursi Menteri Agama saat itu. Ini semua dilakukan sang ayah karena ia ingin anaknya dan juga karena hal ini dianggap penting dalam pendidikan anak sulungnya ini. Pada hari Sabtu, Gus Dur bepergian menemani ayahnya untuk menghadiri acara di Gelora Bung Karno, yang dapat ditempuh dengan

hampir tidak berpengaruh terhadap dirinya karena berhati-hati dan selalu bertindak impulsif.

Belakang Pendidikan KH. Abdurrahman Wahid bertahun-tahun tinggal di Jakarta, Gus Dur sering sering menemaninya pergi kepertemuan-pertemuan. Ia masih menduduki kursi Menteri Agama saat itu. Ini semua dilakukan sang ayah karena ingin anaknya dan juga karena hal ini dianggap penting dalam pendidikan anak sulungnya ini. Pada hari Sabtu, Gus Dur bepergian menemani ayahnya untuk menghadiri acara di Gelanggang Tenggara Jakarta, yang dapat ditempuh dengan

Beberapa tahun setelah kematian ayahnya, Gus Dur dikirim ke Yogyakarta. Bagi anak-anak seusia Gus Dur saat itu, pelajaran di pesantren membuat waktu mereka tersita dan tidak banyak waktu untuk bersantai. Tetapi lain halnya dengan Gus Dur, pelajaran di pesantren dapat dicerna dengan mudah tanpa harus berusaha keras akibatnya dia selalu memiliki banyak waktu untuk bersantai. Sebagian besar waktu senggangnya dihabiskan untuk meluangkan hobinya, seperti membaca tapi bukan bacaan yang berkaitan dengan pelajaran pesantren melainkan buku-buku cerita terutama tentang cerita silat dan peperangan, menonton pertunjukan wayang kulit, menonton di bioskop, menonton sepak bola, main catur dan berbagai permainan yang dimainkan anak seusianya. Selama tinggal di Yogyakarta sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menonton film.¹³⁸

¹³⁸ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012), 54-55.

Pada tahun 1963 Gus Dur pindah ke Mesir untuk melanjutkan studinya setelah beberapa lama di sana ia kemudian pindah ke Baghdad dengan tujuan yang sama yakni menuntut ilmu di suatu Universitas. Setelah studinya selesai, pada pertengahan tahun 1970-an Gus Dur kemudian pindah ke Eropa. Baru pada pertengahan tahun 1971, ia kembali ke Indonesia.

¹³⁹ *Ibid.*, 56.

Sepulang dari pengembarannya dari mencari ilmu. Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada 1971, dia bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebuireng Jombang. Tiga tahun kemudian, dia menjadi sekretaris Pesantren Tebuireng. Dan pada tahun yang sama, Gus Dur mulai menjadi penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut, gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapatkan perhatian banyak.¹⁴¹ Tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya. KH. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebuireng, Jombang, dengan menjadi sekretaris.

Tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula dia merintis Pesantren Ciganjur. Sementara, pada awal 1990, Gus Dur dipercaya sebagai

¹⁴² *Ibid.*, 72.

wakil khatib syaria'ah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial, dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik dilapangan, kebudayaan, politik, maupun pemikiran ke-Islaman. Karier yang dianggap “menyimpang” dalam kapasitasnya sebagai seseorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 1983. Dia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986 dan 1987.¹⁴³

Tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim *abl hall wa al-'aqdi* yang diketuai KH. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1989) dan Muktamar di Cipasung, Jawa Barat (1994). Jabatan ketua PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4. Selama menjadi Presiden, tidak sedikit pemikiran Gus Dur yang kontroversial pendapatnya sering berbeda dari pendapat banyak orang.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid.*, 72.

dan yang khas pakai kacamata tebal. Orang tidak akan mengira dibalik kesederhanaannya itu muncul sesuatu yang mengejutkan, kalau beliau berbicara tentang umat Islam Indonesia, oleh para KH. NU disebut suka nyeleneh.

Paparan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, hingga riwayat organisasi Abdurahman Wahid di atas memberikan gambaran betapa kompleks dan rumitnya perjalanan Abdurahman Wahid dalam meniti kehidupannya. Abdurahman Wahid bertemu dengan berbagai macam orang yang hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, kepentingan, strata sosial dan pemikiran yang berbeda. Dari segi pemahaman keagamaan dan ideologi, Abdurahman Wahid melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, mulai yang dari tradisional, ideologis, fundamentalis, sampai modernis dan sekuler. Dari segi

4. Karya-Karya dan Gelar Kehormatan KH. Abdurrahman Wahid

Keterangan bentuk-bentuk tulisan Gus Dur yang berjumlah 493, yaitu :

- ¹⁴⁷ Azwir Dainy Tara, *Peran Pengusaha Dalam Membangun Demokrasi*, Cet. 1, 116
¹⁴⁸ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur*, cet.1, (Yogyakarta: LKis, 2010), 127.

3. Pada tahun 1990-an (253) tentang Pembaruan ajaran Islam, demokrasi, kepemimpinan umat, pembangunan, HAM, kebangsaan, Parpol, Gender, toleransi agama, Universalisme Islam, NU, Globalisasi.
4. Pada tahun 2000-an (122) Budaya, NU dan Parpol, PKB, demokratisasi dan HAM, ekonomi dan keadilan sosial, ideologi dan negara, tragedi kemanusiaan, Islam dan fundamentalisme.

¹⁵⁰ *Ibid.* 146-149.

10. Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000).¹⁵²

B. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Islam dan Kepemimpinan Perempuan

Sejumlah pemimpin partai-partai politik Islam, beberapa tahun yang lalu, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita tidak tepat dalam pandangan agama. Dasar anggapan itu adalah ungkapan al-Qurân “Lelaki lebih tegak atas wanita (*al rijalu Qawwamuna ala al-Nisa'*)” (QS an-Nisa' [4]:34), yang dapat diartikan menjadi dua macam. Pertama, lelaki bertanggung jawab fisik atas keselamatan wanita; dan kedua, lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Ternyata para pemimpin partai politik Islam di atas memilih pendapat kedua itu, terbukti dari ucapan mereka di muka umum. Anggapan bahwa wanita lebih lemah, yang menjadi pendapat dunia Islam pada umumnya selama ini, dalam kenyataan justru menunjukkan sebaliknya.

¹⁵² Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 70.

l kutipan itu hanya mengenai masalah waris-mev
ngan di atas, yang selalu menilai rendah wani
dalam dunia Islam.

hal ini, agar hak lelaki dan hak wanita m
ena memang Islam menilai seperti itu. Firman A
ungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki
âkum min dzakarin wa untsa),” (QS al-I
n persamaan seperti itu. Perbedaan pria dan
gis, tidak bersifat institusional/kelembagaan
banyak orang dalam literatur Islam klasik. Akibat
pengaruh, termasuk kaum wanitanya sendiri.

l kutipan itu hanya mengenai masalah waris-mev
ngan di atas, yang selalu menilai rendah wani
dalam dunia Islam.

hal ini, agar hak lelaki dan hak wanita m
ena memang Islam menilai seperti itu. Firman A
ungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki
âkum min dzakarin wa untsa),” (QS al-I
n persamaan seperti itu. Perbedaan pria dan
gis, tidak bersifat institusional/kelembagaan
banyak orang dalam literatur Islam klasik. Akibat
pengaruh, termasuk kaum wanitanya sendiri.

l kutipan itu hanya mengenai masalah waris-mev
ngan di atas, yang selalu menilai rendah wani
dalam dunia Islam.

hal ini, agar hak lelaki dan hak wanita m
ena memang Islam menilai seperti itu. Firman A
ungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki
âkum min dzakarin wa untsa),” (QS al-I
n persamaan seperti itu. Perbedaan pria dan
gis, tidak bersifat institusional/kelembagaan
banyak orang dalam literatur Islam klasik. Akibat
pengaruh, termasuk kaum wanitanya sendiri.

Benazir Bhutto harus mengambil keputusan melalui sidang kabinet, dengan para Menteri yang mayoritasnya pria. Dan, kabinet tidak boleh menyimpang dari kebijakan parlemen, juga mayoritas anggotanya adalah pria. Hingga, parlemen pun tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar, dengan penjagaan dan pengawalan dari Mahkamah Agung yang seluruhnya beranggotakan kaum pria. Kata tamu Pakistan tersebut: “Anda benar, namun saya minta Anda tetap membacakan surat al-Fatihah untuk keselamatan bangsa Pakistan.” Apa yang digambarkan di atas menunjuk kepada suatu hal: sulitnya mengubah sebuah pandangan yang telah berabad-abad lamanya diikuti orang. Dalam hal ini, antara pandangan agama Islam di mata orang-orang itu, dalam kenyataan berlawanan dengan apa yang dirumuskan oleh UUD. Seolah-olah terjadi perbenturan antara agama dan Negara. Padahal, dalam kenyataan, ribuan anak-anak perempuan ulama muslimin justru menjadi sarjana S1 hingga S3, karena UUD memungkinkan hal itu. Bukankah persamaan hak antara pria dan wanita dijamin oleh UUD kita, termasuk dalam pendidikan?

[illegible]

Jelaslah, memperjuangkan hak-hak wanita adalah pekerjaan yang masih berat di masa kini, hingga wajiblah kita bersikap sabar dan bertindak hati-hati dalam hal ini. Tetapi, keadaan ini pun, bukanlah hanya monopoli golongan Islam saja. Di Amerika Serikat (AS) yang dianggap memelihara hak-hak wanita dan pria secara berimbang menurut Undang-Undang Dasarnya, ternyata dalam praktik tidak semudah yang diperkirakan. Belum pernah dalam sejarah AS ada presiden wanita, walaupun UUD-nya tidak pernah melarang akan hal itu. Di sini, ternyata terdapat kesenjangan besar antara teori dan praktik dalam sebuah masyarakat paling maju sekalipun.¹⁵³

¹⁵³ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Democracy Project), 132.

C. Metode Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Kepemimpinan Perempuan

¹⁵⁴ M. N. Ibad, *Percmpuan dalam perjuangan Gus Dur-Gus Mick* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 88.

Megawati dengan partainya memenangkan pemilu 1999, secara otomatis seharusnya Megawati bisa terpilih sebagai presiden. Namun, dalam hal ini sebagian ulama dan juga para kelompoknya mempermasalahkan kepemimpinan perempuan.

D. Konsisten Antara Nilai dan Sikap Politik KH. Abdurrahman Wahid

¹⁵⁶ *Ibid*, 89.

Keputusan tersebut menjadi *entri poin* serta sumber legitimasi secara yuridis yang sah bagi gerakan perempuan dan lembaga-lembaga dalam struktur NU maupun di luar NU dalam upaya meningkatkan representasi politik perempuan dan kesadaran terhadap hak-hak perempuan di Indonesia.

¹⁵⁸ Fatayat NU, *Gus Dur di Mata Perempuan*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 108.

Instruksi ini menunjukkan bahwa Gus Dur, sebagai pribadi maupun presiden telah menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh serta serius dalam bidang pembangunan politik yang berwawasan gender. Masih adanya ketidaktahuan, kurangnya empati, dan kurangnya perhatian para aparatur negara selama ini yang kebanyakan laki-laki terhadap persoalan perempuan maupun mengenai kesejahteraan rakyat yang berwawasan gender, menjadikan salah satu alasan penting mengapa instruksi presiden ini dikeluarkan.¹⁵⁹

Ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW:

[illegible]

أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

iman. (HR. Muslim no. 49).¹⁶⁰

menjadi landasan bagi munculnya regulasi-regulasi yang lain.¹⁶¹

semua. Perjuangannya, semuanya ada dalam ide kesetaraan untuk semua dan

¹⁶¹ *Ibid.*, 110.

E. Gus Dur dan Perempuan

Menurut Ibu Shinta, secara pribadi Gus Dur sudah lama berpendapat perempuan boleh menjadi pemimpin atau boleh menjadi apa saja, terutama karena Gus Dur banyak berkawan dengan perempuan yang cerdas. Beliau juga berkaca dari pak Wahid Hasyim, ayahnya yang telah membuat terobosan pada tahun 1950, waktu itu beliau menjadi menteri agama dan mengeluarkan kebijakan dengan membolehkan perempuan menjadi *Qāḍi*/hakim. Pertanyaannya kemudian, mengapa dengan kemoderenan dan cara pandang itu Gus Dur tidak

¹⁶³ Saleh Isree, *Tabayun Gus Dur*, 123.

memasukkan perempuan dalam struktur organisasi NU, PBNU?. Kata Gus Dur, NU itu tempatnya laki-laki dan perempuan itu di Muslimat, ibaratnya seperti suami istri, tugasnya kemudian adalah bagaimana keduanya membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Kalaupun Muslimat, Fatayat dan IPPNU itu kita jangan melihatnya dari aspek gender saja.¹⁶⁴

Selain itu, masyarakat telah banyak melihat kesuksesan kaum wanita memimpin sebuah organisasi, baik formal maupun non formal. KH. Abdurrahman Wahid tidak menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin negara. Sebab pada dasarnya, sukses atau tidaknya kepemimpinan perempuan bukanlah karena kemampuan perempuan 'separoh' laki-laki, melainkan tergantung penerimaan mayoritas laki-laki dalam kepemimpinannya itu.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Menurut KH. Abdurrahman Wahid ayat di atas dapat diartikan menjadi dua macam. Pertama, lelaki bertanggung jawab fisik atas keselamatan wanita; dan kedua, lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Ternyata para pemimpin partai politik Islam di atas memilih pendapat kedua itu, terbukti dari ucapan mereka di muka umum. Anggapan bahwa wanita lebih lemah, yang menjadi pendapat dunia Islam pada umumnya selama ini, dalam kenyataan justru menunjukkan sebaliknya. KH. Abdurrahman Wahid lebih memilih penafsiran

Sejalan dengan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid bahwa semua produk hukum, baik itu yang bersumber dari al-Quran maupun hadist, harus dicari informasi sebanyak-banyaknya tentang akar kesejarahannya, para ulama dan kiai juga harus memiliki kejelian yang sama. Apabila tidak, para ulama dan kiai sebagai salah satu “sumber hukum” di masyarakat bisa terombang-ambing. Lebih jauh, bahkan, mengombang-ambingkan diri (mempermainkan hukum untuk memihak pada pihak yang menguntungkan) dalam permasalahan yang berkembang di dalam kehidupan umat yang terus bergerak.

Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi *khalifah* Allah (wakil Allah) di muka bumi sebagaimana dalam Firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 30:

Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi,"¹⁶⁷

¹⁶⁷ *Ibid.*, 43.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tentang “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah Imamah)”. Adalah sebagai berikut;

1. Menyimpulkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid tidak menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin Negara. Sebab, dalam kenyataan, banyak pemimpin Negara yang sukses justru dari kalangan perempuan. Misalnya Cleopatra, Ratu Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher, Benazir Bhuto, dan lebih jauh lagi Ratu Balqis yang bisa membawa negaranya pada kemakmuran yang hampir menandingi kerajaan Sulaiman as, adalah para pemimpin hebat, karena persamaan hak antara pria dan wanita dijamin oleh UUD, termasuk dalam pendidikan. Sebab sukses tidaknya perempuan menjadi pemimpin sangat bergantung kepada penerimaan laki-laki yang berada dibawah kepemimpinannya, apakah mereka bersedia untuk bekerja sama dibawah komando perempuan atau kah tidak.
2. Dalam *Fiqh Siyasah Imamah* Kepemimpinan Perempuan, tak ada satupun nash al-Qur'an dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan karena, tidak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*

al-Akkad Abbas Mahmoud, *Wanita dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdulrachman Arifin, *Theory Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan*, Jakarta: Kerja Bhratara, 1971.

Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2015.

Ahmad Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur*, cet.1, Yogyakarta: LKis, 2010.

Al Mawardi-Imam, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Al-salus Ali, Imamah dan Khalifah, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2014.

-----, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

Barton Greg, Biografi *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur*, Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012.

A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Echols Jhon M. dan Shadily Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT: Gramedia, 2000.

Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

-----, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Fadhil Lubis Nur Ahmad, *Yurisprudensi Emansipatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2003.

- Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hanbal Ahmad ibn, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Bairut: Dar al-Fikr, 1982.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979.
- Hasyim Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hamim Thoha, *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: 2002.
- Hughes Libby, *Benazir Butho, from Prison to Prime Minister*, Universe: 2000.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Ibad M. N. *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Ibnu Syarif Muzar Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Imawan Riswanda, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997.
- Ismail Nur jannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jalal Nuruzzaman, dan J. Ardiantoro. Pengantar Editor dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Khalaf Abdul Wahab, *Al-siyasah Syar'iyah aw Nidzham Al-dawlah Al-islamiyyah*, Al Kaherah: Dar al Anshar, 1977.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Muri'ah Siti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Mufid AR Achmad, *Ada Apa dengan Gus Dur*, Cet. 1; Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Ma'shum Saifullah, ed., *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* Cet. 1; Bandung: Mizan, 1998.
- Muhammad Husein, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: Rahima, 200.

- Muzadi Hasyim, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: Logos, 1999.
- Mahfudz Sahal MA, *Pesantren Mencari Makna*, Marwan Ja'far, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Munawwar, dari *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Musdah Mulia Siti, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press, 2008.
- , "*Kemuliaan Perempuan dalam Islam*", Cet. I; Megawati Institute, 2014.
- Nakula Dhahir Ma'luf Louis bin Nakula, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Machreq sarl Publishers, 2000.
- NU Fatayat, *Gus Dur di Mata Perempuan*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015).
- Qurthubi Al, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah dkk Fathurrahman, dari *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Qardhawi Yusuf, *Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah*, Bairut: As-syamilah, 1977.
- Ridjal Fauzi, *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, t.p., :tanpa penerbit.
- Rahman Taufiqi, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Rohim Aunur Fakih, dk., *Kepemimpinan Islam*, t.p., :tanpa penerbit, 200.
- Revai Veithzal, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- RI Agama Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 2011.
- Rahman Fazlur, *Major Themes of the Quran*, terjemah, Bandung: Pustaka, 1983.
- Shihab M. Quraish, "*Membumikan al-Qur'an*", Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- , *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syaroh Istib, *Hak-hak Perempuan: Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi* Bandung: PT. Mizan Publika, 2004.

- ## Peraturan Perundang-Undangan

[illegible]

Karya Tulis Ilmiah

Ahmad Zuhri Rangkuti, *Studi analisis Konsep Muhammad, Abduh (1266-1323 H/1849-1905) tentang Al-Qawwamah dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam*, Tesis UIN-SU, Medan, 2014.

Fatimah Siti, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Al-hikmah, Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, nomor 1, Maret 2005. diakses pada: 29 Agustus, 2018.

Marwah, Vol. IV, No. 2 Desember 2006, Pekanbaru: PSW UIN Suska Riau,
diakses pada: 29 Agustus, 2018.

So'idah. Skripsi, *Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Islam*. fak. Syari'ah thn. 2002.

Taimiyah Ibn, *al-Siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam*, Terjemahan Rofi' Tead Mamla Saidah Elbina, "Konsep Kepemimpinan dalam Islam", *Jurnal Al-Ishlah*, Volume., 2004. diakses pada: 29 Juli 2018.

Zakaria Samsul Skripsi, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

Zamakhshary Al, *al-Kasysyaf, Perempuan Islam dalam Realitas Sosial Budaya*, dalam Jurnal Marwah, Vol. IV, No. 2 Desember 2006, Pekanbaru: PSW UIN Suska Riau: 2006.

Internet

Dari 123 calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan yang mengikuti Pilkada 2015, setidaknya ada 35 calon perempuan yang terpilih,” dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 [Lihat http://www.rappler.com/indonesia/115543-perempuan-menang-di-pilkada-2015](http://www.rappler.com/indonesia/115543-perempuan-menang-di-pilkada-2015)). diakses pada: 29 Juli 2018.

Mulia Musdah, *Prinsip Kesetaraan Gender*, [http://docplayer.info/146875-Prinsip kesetaraan-manusia-musdah-mulia.html](http://docplayer.info/146875-Prinsip-kesetaraan-manusia-musdah-mulia.html), diakses pada: 29 Juli 2018.

<http://sinarharapan.co/news/read/141230079/-i-gus-dur-pembela-perempuan-i-> diakses pada: 29 Juli 2018.

<http://www.tunas63.wordpress.com/2009/12.../biografi-gus-dur-dan-keluarga>. diakses pada 6 Agustus 2018, pukul 19.43).

Biografi Abdurrahman Wahid, dalam <http://wiwitfatur.wordpress.com/2009/04/21/biografi-abdurrahman-wahid>, di ambil pada: 29 Juli 2018, pkl. 17:17 WIB.

<http://www.pustakasekolah.com/emansipasi-wanita-dan-maknanya.html/2012>.
diakses pada: 7 November 2018, pukul 21:06.

